

**WORKSHOP PEMBERDAYAAN ORGANISASI DAN KOMUNITAS
PEREMPUAN DI PULAU LOMBOK DALAM RANGKA MENDUKUNG
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)****Syaiful Anam*, Khairur Rizki, Heavy Nala Estriani***Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram**Alamat korespondensi: s.anam@unram.ac.id***ABSTRAK**

Di tengah dominasi wacana global mengenai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan di wilayah Global South, termasuk Lombok dan Nusa Tenggara Barat (NTB), menuntut pendekatan yang lebih kontekstual agar sejalan dengan realitas sosial dan budaya setempat. Workshop bertema “Merancang Gerakan Gender Dari Akar Rumput: Penguatan Kapasitas dan Strategi Advokasi di Komunitas” diadakan untuk membuka ruang dialog kritis antara mahasiswa, aktivis muda, dan komunitas lokal guna merefleksikan strategi pemberdayaan perempuan yang halus, etis, membumi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui metode partisipatif berupa storytelling, diskusi interaktif, refleksi kritis, dan identifikasi advokasi lokal dengan melibatkan sekitar 20 peserta dari kalangan mahasiswa lintas fakultas dan komunitas/NGO, workshop ini berhasil meningkatkan kesadaran kritis tentang pentingnya agensi perempuan berbasis nilai lokal, mendokumentasikan gagasan kontekstual advokasi, serta membangun jejaring kolaboratif untuk keberlanjutan inisiatif. Kegiatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan pemberdayaan lokal, tetapi juga secara langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender, tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan, dan tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh, yang relevan dengan konteks perempuan di Pulau Lombok. Dengan demikian, workshop ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan perempuan yang efektif tidak harus meniru model eksternal, tetapi harus mengakar pada budaya lokal sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: agensi perempuan, kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu agenda global yang menempati posisi sentral dalam wacana pembangunan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), secara tegas menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu pilar utama pembangunan, yaitu pada Tujuan ke-5 (Gender Equality). Tujuan ini tidak hanya menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga menekankan urgensi pemberdayaan perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya (UNDP, 2020). Dengan demikian, kesetaraan gender tidak semata persoalan keadilan normatif, melainkan juga prasyarat untuk mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Namun, di balik narasi besar yang diusung lembaga-lembaga internasional, realitas di tingkat lokal, khususnya di wilayah *Global South*, sering kali menunjukkan kompleksitas yang berbeda. Pemberdayaan perempuan di daerah seperti Lombok dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat serta-merta disamakan dengan model pemberdayaan yang berkembang di negara-negara Barat. Faktor-faktor seperti nilai budaya, struktur sosial, peran agama, serta kondisi ekonomi-politik lokal memainkan peranan penting dalam membentuk dinamika agensi perempuan.

Dalam konteks Lombok, beberapa isu krusial yang dihadapi perempuan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, praktik perkawinan usia dini masih menjadi persoalan serius. Data BPS NTB (2021)

menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di NTB termasuk yang tertinggi di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 18,6%. Di Lombok Timur misalnya, banyak kasus pernikahan anak terjadi karena alasan ekonomi, tradisi, dan norma sosial yang masih kuat (Plan Indonesia, 2022). Hal ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya tingkat pendidikan perempuan, terbatasnya akses pada pekerjaan layak, serta tingginya kerentanan terhadap kemiskinan.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi masih terbatas. Meskipun tingkat partisipasi sekolah dasar cukup tinggi, data menunjukkan adanya penurunan signifikan pada jenjang menengah dan tinggi, terutama di daerah pedesaan (BPS, 2022). Hambatan ekonomi, norma gender, dan praktik perkawinan dini menjadi faktor utama yang membatasi kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan.

Kemudian, dalam bidang ekonomi, perempuan Lombok banyak terlibat dalam sektor informal seperti tenun tradisional, pertanian, atau perdagangan kecil. Namun kontribusi mereka seringkali tidak diakui secara formal dan kurang mendapat dukungan kebijakan, sehingga posisi tawar mereka tetap lemah (Kusnadi, 2020). Lebih jauh lagi, dari sisi politik dan kepemimpinan, representasi perempuan NTB dalam lembaga legislatif masih rendah. Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPRD NTB hanya mencapai 17,7%, jauh dari target 30% kuota keterwakilan perempuan (KPU NTB, 2019). Hal ini menunjukkan masih terbatasnya ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan publik.

Di tengah tantangan tersebut, penting dicatat bahwa perempuan Lombok juga memiliki modal sosial dan kultural yang dapat menjadi basis pemberdayaan. Misalnya, peran perempuan dalam tradisi tenun songket bukan hanya bagian dari identitas budaya, tetapi juga sumber ekonomi rumah tangga. Demikian pula, dalam komunitas Islam lokal, perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam pendidikan agama, pengajian, atau organisasi sosial-keagamaan, meskipun peran tersebut sering kali belum dioptimalkan untuk mendorong transformasi sosial.

Fakta-fakta ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan perempuan di Lombok membutuhkan pendekatan yang mengakar pada konteks lokal. Model pemberdayaan yang hanya meniru dari luar cenderung tidak efektif karena tidak sensitif terhadap dinamika budaya dan sosial yang ada. Oleh karena itu, kegiatan seperti Workshop bertema “Merancang Gerakan Gender Dari Akar Rumput: Penguatan Kapasitas dan Strategi Advokasi di Komunitas” ini memiliki relevansi penting, tidak hanya sebagai forum refleksi kritis, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk menghubungkan pengalaman lokal dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Meskipun berbagai program pemberdayaan perempuan telah dijalankan di Indonesia, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi oleh perempuan di Lombok dan NTB, yakni:

1. Tingginya angka perkawinan anak yang membatasi kesempatan pendidikan dan ekonomi perempuan.
2. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja formal.
3. Keterbatasan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan di sektor informal.
4. Minimnya representasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
5. Lemahnya jejaring kolaboratif antara organisasi perempuan, komunitas lokal, dan generasi muda.

Oleh karen itu, secara umum, workshop ini bertujuan meningkatkan kesadaran kritis tentang pentingnya agensi perempuan berbasis nilai lokal serta memperkuat kapasitas organisasi dan komunitas perempuan di Lombok dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, tujuan kegiatan ini meliputi:

1. Membuka ruang dialog kritis mengenai strategi pemberdayaan perempuan yang kontekstual, membumi, dan etis.
2. Mengidentifikasi isu-isu advokasi lokal yang relevan dengan kebutuhan perempuan di Lombok.
3. Meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa, komunitas, dan organisasi perempuan dalam membangun jejaring advokasi berkelanjutan.
4. Mendokumentasikan gagasan dan strategi pemberdayaan perempuan berbasis nilai lokal untuk mendukung pencapaian SDGs.

Relevansi workshop ini terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu:

1. SDG 5 (Kesetaraan Gender) melalui penghapusan diskriminasi dan penguatan agensi perempuan.

2. SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) melalui peningkatan kapasitas perempuan untuk mengakses peluang sosial-ekonomi.
3. SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi inklusif.

Dalam workshop ini, konsep agensi perempuan menjadi kunci. Agensi dipahami sebagai kapasitas perempuan untuk bertindak secara otonom, membuat pilihan, dan mengartikulasikan kepentingannya meski dalam keterbatasan (Kabeer, 1999; Mahmood, 2005). Di Lombok, agensi sering kali dimanifestasikan melalui negosiasi halus dengan norma lokal, bukan perlawanan frontal (Wardatun, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan inklusivitas dan keberlanjutan berbasis kearifan lokal (UN Women, 2018).

METODE KEGIATAN

Workshop ini dirancang sebagai kegiatan partisipatif dengan mengusung pendekatan *community-based learning* yang menekankan kolaborasi antara pemuda lintas organisasi, komunitas, dan universitas di Pulau Lombok. Tujuan desain ini adalah menciptakan ruang belajar bersama yang memungkinkan peserta saling bertukar pengalaman, merefleksikan realitas pemberdayaan perempuan, dan merumuskan strategi advokasi berbasis lokal.

Peserta workshop berjumlah sekitar 20 orang, terdiri dari:

1. Mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Mataram dan universitas lain di Lombok seperti Stikes Kusuma Bangsa, dan Poltekkes Mataram.
2. Perwakilan komunitas perempuan lokal, termasuk kelompok tenun tradisional, komunitas desa, dan organisasi keagamaan perempuan.
3. Aktivis muda dan NGO lokal yang bergerak di bidang gender, pendidikan, dan perdamaian, antara lain: ECCO Foundation, Migrant Care, Beriuk Bareng Peduli, Relawan Cerdas NTB, dan Rumah Perempuan Migrant.

Metode Pelaksanaan workshop ini yaitu:

1. Storytelling: peserta perempuan dari komunitas lokal membagikan pengalaman hidup terkait agensi, peran sosial, dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Diskusi interaktif: mahasiswa dan aktivis muda diajak merefleksikan pengalaman tersebut dan menghubungkannya dengan teori maupun wacana global tentang gender.
3. Refleksi kritis: fasilitator memandu peserta untuk mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang dapat menjadi basis strategi pemberdayaan perempuan.
4. Identifikasi advokasi lokal: peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk merumuskan isu-isu prioritas advokasi yang relevan dengan kebutuhan perempuan Lombok.
5. Penyusunan jejaring kolaboratif: workshop ditutup dengan pembentukan forum jejaring pemuda dan komunitas perempuan sebagai langkah tindak lanjut.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

1. Terbangunnya pemahaman kolektif tentang pentingnya pemberdayaan perempuan berbasis nilai lokal.
2. Terdokumentasikannya gagasan dan strategi advokasi yang kontekstual.
3. Terbentuknya jejaring kolaboratif antara pemuda, organisasi, dan komunitas perempuan di Lombok.
4. Kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Workshop bertema “Merancang Gerakan Gender Dari Akar Rumput: Penguatan Kapasitas dan Strategi Advokasi di Komunitas” ini dilaksanakan di Mataram dengan melibatkan 20 peserta dari kalangan mahasiswa lintas fakultas, organisasi pemuda, serta komunitas perempuan lokal. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh dengan pola interaktif, partisipatif, dan reflektif.

Acara dibuka dengan pengantar konseptual mengenai pemberdayaan perempuan dari perspektif Global South. Pemateri pertama dari Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram yang diwakili oleh Syaiful Anam, S.IP., M.Sc., MIS. menekankan bahwa cara pandang tentang perempuan sering dibentuk secara eksternal. Dalam tradisi Barat, pemberdayaan

biasanya dipahami melalui pendekatan liberal, yaitu mendorong kebebasan individu, protes terhadap patriarki, dan perlawanan frontal. Namun, kerangka ini tidak selalu sesuai dengan realitas sosial budaya masyarakat *Global South*. Perspektif alternatif justru melihat bahwa agensi perempuan dapat diwujudkan melalui resistensi halus dan berbasis nilai lokal, sebagaimana dicontohkan dalam karya Saba Mahmood (2005) tentang kebangkitan Islam di Mesir. Mahmood memperlihatkan bahwa ketaatan religius, seperti berhijab dan menghadiri kajian, bisa menjadi bentuk agensi perempuan, bukan sekadar kepatuhan, karena di dalamnya terdapat kapasitas negosiasi terhadap norma.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh pemateri dan peserta dari kalangan mahasiswa, komunitas dan organisasi pemuda sedang menyimak.

Selain itu, pemateri mengangkat contoh Baiq Rumita dari Lombok Timur, yang dikenal sebagai “Kartini Sasak” karena perjuangannya mendirikan sekolah bagi anak perempuan di tengah tradisi yang membatasi akses pendidikan. Rumita melawan struktur patriarki bukan dengan konfrontasi, melainkan dengan memberi ruang pendidikan baru bagi perempuan. Hal ini sejalan dengan praktik organisasi La Rimpu yang dikembangkan oleh Prof. Atun Wardatun, yang menunjukkan perempuan mampu menjadi *peacebuilder* dalam meredam konflik lokal.



Gambar 2. Peserta workshop melakukan refleksi kritis atas pengalamannya dalam melakukan advokasi gender dan perempuan di Lombok.

Materi kedua disampaikan oleh Mega Nisfa Makhroja, pendiri *Rumah Perempuan Migran (RPM)*. Ia memaparkan praktik pemberdayaan perempuan migran sejak 2007, terutama di bidang literasi digital finansial, perlindungan pekerja migran, kesehatan mental, dan UMKM perempuan. RPM juga mengembangkan aplikasi digital *Juang* untuk membantu pembukuan keuangan UMKM perempuan migran. Mega menekankan bahwa meskipun banyak program telah dijalankan, tantangan besar masih ada: rendahnya literasi digital, minimnya mindset pendidikan masyarakat, serta rentannya perempuan migran terhadap *human trafficking*. Oleh karena itu, kolaborasi multisektor (NGO, pemerintah, komunitas) sangat diperlukan.

Selain dua materi utama, workshop juga menghasilkan capaian-capaian konkret:

1. Meningkatnya kesadaran kritis peserta tentang pentingnya agensi perempuan berbasis nilai lokal. Peserta mahasiswa menyadari bahwa narasi pemberdayaan tidak cukup jika hanya merujuk pada model Barat, tetapi harus menyesuaikan diri dengan realitas budaya, agama, dan sosial di Lombok. Hal ini sejalan dengan Cornwall & Rivas (2015) yang menekankan perlunya agenda gender transformatif yang sensitif konteks.
2. Terdokumentasikannya pengalaman perempuan lokal melalui *storytelling*. Beberapa perempuan berbagi kisah tentang pernikahan usia dini, terbatasnya akses pendidikan, hingga perjuangan menopang ekonomi keluarga melalui tenun tradisional. Kisah ini memperlihatkan bagaimana agensi perempuan muncul bukan hanya melalui perlawan terbuka, melainkan strategi adaptif sehari-hari (Mahmood, 2005; Wardatun, 2021).
3. Teridentifikasinya isu-isu advokasi lokal, yang mencakup:
 - a. Pencegahan perkawinan anak melalui edukasi keluarga dan komunitas.
 - b. Penguatan ekonomi perempuan melalui UMKM desa, tenun, dan pertanian.
 - c. Peningkatan partisipasi perempuan dalam organisasi lokal dan lembaga desa.
4. Terbentuknya jejaring kolaboratif pemuda dan komunitas perempuan. Forum daring (WhatsApp Group) dibentuk untuk memantau tindak lanjut advokasi, berbagi informasi, serta mengorganisir aksi bersama.

Dari kegiatan workshop ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan perempuan di Lombok perlu dipahami dari dua dimensi: lokalitas dan globalitas.

1. Dari sisi lokalitas, pengalaman perempuan Lombok menegaskan bahwa pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya dan norma sosial. Praktik seperti tenun tradisional memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pengrajin, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya dan penopang ekonomi rumah tangga (Kusnadi, 2020). Demikian pula, tokoh lokal seperti Baiq Rumita menunjukkan bahwa perubahan sosial bisa dilakukan dengan cara halus yang berakar pada konteks.
2. Dari sisi globalitas, workshop memperlihatkan bagaimana pengalaman lokal terhubung dengan agenda global pembangunan berkelanjutan. Isu-isu seperti pencegahan perkawinan anak, penguatan ekonomi perempuan, dan representasi politik memiliki keterkaitan erat dengan SDG 5 (Gender Equality), SDG 10 (Reduced Inequalities), dan SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). Kegiatan ini menjadi bukti bahwa aksi lokal dapat memberi kontribusi nyata pada target global (UN Women, 2018).

Selain itu, materi Mega Nisfa menyoroti pentingnya literasi digital dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini menambah dimensi baru pada pemberdayaan perempuan di NTB: bukan hanya soal advokasi lokal, tetapi juga soal diaspora perempuan yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan Lombok tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga transnasional.



Gambar 3. Peserta workshop setelah sesi acara penutupan

Pembentukan jejaring kolaboratif pasca-workshop juga menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Sejalan dengan Kabeer (1999), pemberdayaan bukan hasil instan, melainkan proses yang membutuhkan interaksi antara sumber daya, agensi, dan pencapaian. Jejaring pemuda dan komunitas perempuan di Lombok berpotensi menjadi modal sosial untuk advokasi jangka panjang.

Dengan demikian, workshop ini berhasil tidak hanya meningkatkan kesadaran kritis peserta, tetapi juga:

1. Menyediakan ruang dokumentasi pengalaman perempuan lokal.
2. Menghasilkan isu advokasi prioritas yang kontekstual.
3. Membangun jejaring kolaboratif untuk keberlanjutan.

Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan di Lombok efektif jika dilakukan dengan strategi yang berakar pada nilai lokal, terbuka pada inovasi digital, dan terhubung dengan agenda pembangunan global.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Workshop “Merancang Gerakan Gender Dari Akar Rumput: Penguatan Kapasitas dan Strategi Advokasi di Komunitas” menghasilkan beberapa kesimpulan penting mengenai dinamika pemberdayaan perempuan di Lombok. Pertama, pemberdayaan berbasis nilai lokal dinilai lebih relevan dibanding strategi yang meniru pola Barat. Hal ini karena konteks sosial, budaya, dan agama di Lombok menuntut pendekatan yang membumi. Agensi perempuan dapat terwujud melalui resistensi halus, negosiasi norma, serta praktik sehari-hari yang memperluas ruang gerak mereka. Kedua, pengalaman perempuan lokal terbukti menjadi sumber inspirasi advokasi. Kisah mengenai pernikahan anak, keterbatasan pendidikan, dan kontribusi ekonomi melalui tenun menunjukkan kapasitas adaptif perempuan dalam menghadapi ketidaksetaraan, sekaligus memperkaya pemahaman tentang bentuk-bentuk agensi perempuan di NTB. Ketiga, workshop ini juga berhasil mengidentifikasi isu advokasi prioritas, yaitu pencegahan perkawinan anak, penguatan ekonomi perempuan di sektor informal, serta peningkatan representasi perempuan dalam kepemimpinan lokal. Keempat, pemberdayaan perempuan di NTB tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga transnasional. Isu pekerja migran menambah dimensi global, khususnya terkait literasi digital, perlindungan dari human trafficking, dan penguatan ekonomi perempuan migran. Kelima, jejaring kolaboratif yang terbentuk melalui forum komunikasi daring antara mahasiswa, pemuda, dan komunitas perempuan dinilai sebagai modal sosial berharga untuk memastikan keberlanjutan advokasi pasca-workshop, sejalan dengan pandangan Kabeer (1999) bahwa pemberdayaan merupakan proses jangka panjang.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk memperkuat keberlanjutan gerakan pemberdayaan perempuan di Lombok. Bagi komunitas lokal, penting untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga dalam rangka mencegah perkawinan anak serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kearifan lokal seperti tenun, UMKM, dan pertanian. Bagi akademisi dan mahasiswa, diperlukan kelanjutan penelitian dan pendampingan komunitas perempuan agar narasi pemberdayaan kontekstual terus berkembang, sekaligus mengintegrasikan pengalaman lokal ke dalam kajian akademis untuk memperkaya literatur tentang agensi perempuan di Global South. Pemerintah daerah direkomendasikan merancang kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga desa maupun daerah, serta memperluas akses perempuan terhadap literasi digital, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan UMKM. Jaringan pemuda dan NGO disarankan untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi melalui forum daring dan kegiatan bersama, serta membangun kerja sama lintas daerah guna memperluas jangkauan advokasi dan solidaritas gerakan perempuan. Sementara itu, aktor internasional dan mitra pembangunan diharapkan dapat mendukung inisiatif pemberdayaan perempuan berbasis lokal di NTB dengan pendekatan partisipatif, serta memberikan ruang bagi praktik baik dari Lombok untuk terhubung dengan agenda global SDGs, khususnya tujuan 5, 10, dan 16.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram, yang telah memberi dukungan finansial sehingga terlaksananya pengabdian masyarakat ini, serta juga kepada Rumah Perempuan Migran (RPM) sebagai mitra dalam proses dan terlaksananya pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Gender Tematik: Perkawinan Anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Gender Tematik: Ketenagakerjaan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cornwall, A., & Rivas, A. M. (2015). From ‘gender equality and ‘women’s empowerment’ to global justice: reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kusnadi, E. (2020). Perempuan dan ekonomi informal di NTB: antara kontribusi dan marginalisasi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 55–72. <https://doi.org/10.24198/sosiop.v8i1.23460>
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Plan Indonesia. (2022). *Laporan Pencegahan Perkawinan Anak di NTB*. Jakarta: Yayasan Plan International Indonesia.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. New York: United Nations Development Programme.
- UN Women. (2018). *Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- Wardatun, A. (2021). Women, Islam, and local peacebuilding in Eastern Indonesia: Negotiating norms and agency. *Asian Journal of Peacebuilding*, 9(2), 235–257. <https://doi.org/10.18588/202105.00a177>